

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagai faktor penentu kemakmuran, pembangunan ekonomi yang kuat dan berkelanjutan menjadi kunci penting bagi suatu wilayah atau negara dalam mencapai kemakmuran. Secara umum, pembangunan ekonomi merupakan kegiatan yang direncanakan untuk memperbaiki atau meningkatkan kemakmuran masyarakat dengan memanfaatkan faktor-faktor pendukung yang ada. Dalam pembangunan ekonomi, masyarakat dituntut untuk berperan sebagai tokoh utama. Sedangkan pemerintah berperan sebagai pendukung dan pembimbing agar suatu pembangunan ekonomi dapat berjalan dengan lancar (Marini, 2016).

Proses pembangunan ekonomi melibatkan berbagai dimensi yang meliputi perubahan pola pikir masyarakat terhadap kehidupan, struktur sosial, serta organisasi pemerintahan ataupun masyarakat. Tidak hanya itu, proses ini juga melibatkan perubahan dalam upaya menangani kemiskinan, mengurangi kesenjangan pendapatan, dan pertumbuhan ekonomi. Agar tujuan pembangunan tercapai, maka perlu memfokuskan kegiatan pada tiga aspek utama, yaitu menambah jumlah produksi dan distribusi kebutuhan dasar, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan ekonomi maupun sosial, dan memperbaiki kualitas hidup masyarakat (Todaro, 2006).

Dalam meningkatkan keberhasilan pembangunan ekonomi, pertumbuhan ekonomi memiliki peranan penting sebagai salah satu faktor yang dapat menentukan keberhasilan tersebut. Dalam proses meningkatkan kesejahteraan masyarakat, keduanya memiliki kaitan yang erat. Pertumbuhan ekonomi dikatakan sebagai suatu kegiatan dalam menambah produksi barang dan jasa guna meningkatkan kemakmuran masyarakat. Dengan demikian, kemakmuran masyarakat yang meningkat tentu akan memperlancar proses pembangunan (Sukirno, 2013).

Terdapat banyak teori mengenai pertumbuhan ekonomi, salah satunya adalah teori *Solow-Swan* yang dikemukakan oleh Robert M. Solow dan T.W Swan tahun 1970. Teori ini banyak diterapkan karena relevan dengan perekonomian global dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi saat ini. Menurut Teori Solow-Swan, pertumbuhan ekonomi tidak terlepas dari 3 aspek, yaitu investasi modal, tenaga kerja, dan teknologi (Sari, 2022).

Dalam mengevaluasi apakah pertumbuhan ekonomi suatu wilayah bernilai positif atau negatif serta seberapa besar pertumbuhannya, maka dapat diukur melalui Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) lebih tepatnya atas dasar harga konstan (ADHK). Nilai PDRB yang tinggi menandakan meningkatnya produksi barang dan jasa di daerah tersebut. Dengan demikian, perekonomian suatu daerah dicerminkan dari tinggi dan meningkatnya nilai PDRB yang berdampak terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi di suatu daerah (Sukirno, 2013).

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), PDRB Provinsi Sumatera Barat rata-rata menempati posisi ke-13 selama 7 tahun terakhir dengan nilai PDRB yang terus mengalami peningkatan. Sebaliknya, pada pertumbuhan ekonomi terus mengalami penurunan selama 7 tahun terakhir. Artinya, perekonomian di Provinsi Sumatera Barat bisa terbilang belum cukup maju. Ditambah lagi dengan pandemi Covid-19 yang menyebabkan nilai pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sumatera Barat menurun drastis.

Tabel 1.1
Nilai PDRB (ADHK) dan Laju Pertumbuhan Ekonomi
Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015 – 2021

Tahun	PDRB ADHK (Juta Rupiah)	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)
2015	140.719.474,1	5,53
2016	148.134.243,8	5,26
2017	155.984.364,1	5,3
2018	163.996.189,0	5,14
2019	172.205.571,3	5,01
2020	169.416.717,9	-1,62
2021	174.996.062,3	3,29

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Barat

Pada tabel 1.1 diatas, nilai PDRB Sumatera Barat selama 7 tahun terakhir atas dasar harga konstan (ADHK) mengalami perkembangan yang cukup bagus meskipun sempat mengalami perlambatan di tahun 2020. Namun sebaliknya pada laju pertumbuhan ekonomi, Provinsi Sumatera Barat lebih mengalami penurunan di setiap tahunnya. Bahkan akibat dari Covid-19 pada tahun 2020, laju pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan drastis sehingga bernilai negatif. Akan tetapi pada tahun 2021, mengalami kenaikan meskipun tidak setinggi laju pertumbuhan ekonomi pada tahun-tahun sebelumnya. Hal ini membuktikan bahwa perekonomian di Provinsi Sumatera Barat masih belum bagus dan belum bisa meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi.

Oleh karena itu, diperlukan peran penting dari pemerintah dan masyarakat dalam meningkatkan perekonomian di Provinsi Sumatera Barat dengan meningkatkan faktor-faktor penting yang dapat mendorong peningkatan perekonomian. Beberapa faktor yang dapat mendorong peningkatan tersebut adalah investasi swasta (PMDN dan PMA), angkatan kerja, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Investasi diartikan sebagai kegiatan penanaman modal dalam bidang tertentu. Salah satu cara investasi adalah dalam bentuk saham yang dimana investor menanamkan dananya di pasar bursa dengan tujuan untuk mencari tingkat pengembalian investasi (*return*) atau pendapatan (Dendi, 2017).

Investasi tidak hanya bersumber dari pemerintah, tetapi juga bisa bersumber dari pihak swasta. Investasi yang bersumber dari pihak swasta terbagi atas 2 macam yaitu Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA). Pada penelitian ini, kedua investasi swasta tersebut digunakan untuk mengetahui apakah memiliki pengaruh terhadap perekonomian di Provinsi Sumatera Barat.

Provinsi Sumatera Barat memiliki SDA yang melimpah sehingga berpotensi menciptakan peluang investasi (Adril, 2022). Dengan adanya

investasi, suatu wilayah memiliki peluang untuk menciptakan usaha baru dan lapangan pekerjaan bagi masyarakat (Arsyad, 2004).

Tabel 1.2
Realisasi PMDN dan PMA di Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2015-2021

Tahun	Realisasi PMDN (Juta Rupiah)	Realisasi PMA (Ribu US\$)
2015	1.552.489,5	57.133,4
2016	3.795.575,5	79.268,1
2017	1.516.964,3	194.425,2
2018	2.309.449,6	180.799,7
2019	3.026.645,8	157.113,9
2020	3.106.178,7	125.589,4
2021	4.183.713,9	66.949,0

Sumber: BKPM (2022)

Pada tabel 1.2 diatas, terlihat bahwa pada 7 tahun terakhir yaitu dari tahun 2015-2021, terjadi peningkatan realisasi PMDN yang signifikan dari tahun 2017-2021. Namun pada tahun 2016-2017 mengalami penurunan dari 3.795.575,5 juta rupiah menjadi 1.516.964,3 juta rupiah. Sebaliknya, pada sisi PMA mengalami peningkatan pada tahun 2015-2017, namun mengalami penurunan dari 194.425,2 ribu USD pada tahun 2018 menjadi 66.949,0 ribu USD pada tahun 2021.

Berdasarkan data BKPM (2022), masih banyak daerah yang memiliki nilai investasi yang sangat rendah. Beberapa penyebabnya adalah sulitnya memperoleh perizinan, terdapatnya kebijakan dan regulasi yang memberatkan investor, dan permasalahan kepemilikan tanah seperti tanah ulayat atau milik kaum (Elfisha, 2020). Selain itu, Zakki dan Samsyir (2023) juga menyebutkan bahwa Provinsi Sumatera Barat memiliki peluang investasi untuk menarik investor, namun paradigma birokrasi pemerintah daerah dalam pelayanan kepada investor masih belum bagus, pembangunan infrastruktur yang belum merata, dan kurangnya kreativitas pemerintah dalam mempromosikan peluang bisnis yang ada menyebabkan rendahnya minat dan penyerapan investor di daerah Provinsi Sumatera Barat.

Selanjutnya, indikator yang ikut mempengaruhi perekonomian adalah angkatan kerja. Di Indonesia, angkatan kerja digolongkan kepada masyarakat

dengan usia 15 tahun atau lebih. Menurut Todaro (2006), peningkatan perekonomian di suatu daerah dipicu oleh angkatan kerja dan pertumbuhan penduduk. Tingkatkan produksi akan semakin meningkat jika suatu negara memiliki angkatan kerja yang banyak. Namun jika suatu wilayah memiliki pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali, maka memungkinkan terjadinya peningkatan pengangguran yang dapat menghambat perekonomian di suatu daerah apabila tidak diiringi penambahan lapangan pekerjaan. Oleh karena itu, perekonomian suatu daerah dapat terganggu jika daerah tersebut tidak mampu menyerap tenaga kerja dengan baik.

Tabel 1.3
Keadaan Angkatan Kerja di Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2015-2021

Tahun	Bekerja (jiwa)	Pengangguran Terbuka (jiwa)	TPT (persen)	Jumlah Angkatan Kerja (Jiwa)
2015	2.184.599	161.564	6,89	2.346.163
2016	2.347.911	125.903	5,09	2.473.814
2017	2.344.972	138.703	5,58	2.483.675
2018	2.480.405	148.699	5,66	2.629.104
2019	2.540.040	144.349	5,38	2.684.389
2020	2.581.524	190.609	6,88	2.772.133
2021	2.581.444	179.948	6,52	2.761.392

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Barat (2022)

Berdasarkan tabel 1.3 diatas, selama 7 tahun terakhir terjadi perkembangan yang cukup baik dari jumlah angkatan kerja yang bekerja. Akan tetapi, upaya penurunan tingkat pengangguran terbuka terlihat masih belum berhasil. Dimulai dari tahun 2015 yang dimana tingkat pengangguran terbuka (TPT) bernilai 6.89%. Walaupun mengalami penurunan pada tahun 2016 menjadi 5,09%, tingkat pengangguran terbuka kembali meningkat dari tahun 2017-2020 dengan nilai 6,88% pada tahun 2020.

Berdasarkan data BPS (2022), Provinsi Sumatera Barat memiliki pertumbuhan penduduk yang besar sehingga memiliki potensi SDM yang tinggi. Faktor angkatan kerja juga sangat penting dalam perekonomian, karena dengan tingginya angkatan kerja maka akan menambah produktivitas barang dan jasa di suatu wilayah (Jefry, dkk., 2019). Peningkatan TPT yang terjadi di

Provinsi Sumatera Barat membuktikan bahwa penyerapan tenaga kerja Sumatera Barat belum maksimal dan masih diperlukan upaya dalam memperbaiki masalah tersebut seperti dengan menambah jumlah lapangan pekerjaan sehingga dapat meningkatkan jumlah angkatan kerja yang bekerja.

Indikator selanjutnya yang ikut mempengaruhi perekonomian adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM merupakan salah satu aspek penting yang perlu diperhatikan oleh suatu negara atau daerah. Indeks ini menjadi ukuran keberhasilan suatu pemerintahan dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakatnya. Tingkat IPM yang tinggi dapat berperan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi karena modal manusia memiliki peran krusial dalam perekonomian. Pembangunan manusia yang berkualitas memiliki dampak besar terhadap kemampuan penduduk dalam mengadopsi teknologi dan sistem kelembagaan yang dapat mendorong perekonomian. Pandangan ini sejalan dengan teori ekonomi endogen yang mengakui pentingnya sumber daya manusia sebagai modal utama untuk mencapai peningkatan perekonomian. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa peningkatan kualitas manusia akan memberikan dorongan bagi peningkatan pertumbuhan ekonomi (Hanifah, 2021).

Berdasarkan BPS (2022), terdapat 3 dimensi dasar dalam IPM yang mencakup atas standar hidup layak, umur panjang dan hidup sehat, serta pengetahuan. Selanjutnya, tiga dimensi dasar tersebut memiliki empat komponen yang terdiri atas pengeluaran per kapita yang disesuaikan (PPP), rata-rata lama sekolah (RLS), harapan lama sekolah (HLS), dan umur harapan hidup (UHH).

Tabel 1.4
Perkembangan Komponen Pembangunan Manusia
dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) d Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2015-2021

Komponen	Tahun							Rata-Rata Pertumbuhan (%)
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
UHH (tahun)	68.66	68.73	68.78	69.01	69.31	69.47	69.59	0.22
HLS (tahun)	13.6	13.79	13.94	13.95	14.01	14.02	14.09	0.59
RLS (tahun)	8.42	8.59	8.72	8.76	8.92	8.99	9.07	1.25
PPP (Rp000)	9.8	10.13	10.31	10.64	10.93	10.73	10.8	1.65
IPM (Skor)	69.98	70.73	71.24	71.73	72.39	72.38	72.65	0.63

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Barat (2022)

Pada tabel 1.4 diatas, semua komponen IPM selalu mengalami peningkatan dari tahun 2015-2021 meskipun pengeluaran perkapita yang disesuaikan (PPP) sempat mengalami sedikit perlambatan pada tahun 2020 akibat Covid-19. Sama halnya dengan nilai IPM yang terus mengalami peningkatan setiap tahunnya meskipun terjadi perlambatan di tahun 2020 akibat Covid-19.

Dalam mengetahui gambaran kualitas SDM di Sumatera Barat, maka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sangat dibutuhkan untuk mengukur, dan memperbaiki serta meningkatkan kualitas SDM di wilayah tersebut. Sehingga hal tersebut berdampak terhadap peningkatan produktivitas barang dan jasa sehingga peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat tercapai (Rahmawati, 2019).

Berdasarkan penelitian terdahulu, Lubis, dkk (2021) dalam penelitiannya menunjukkan PMDN berkorelasi positif dan signifikan terhadap PDRB. Namun terjadi kontradiksi pada penelitian Hadi (2021) yang dimana PMDN berkorelasi negatif dan tidak signifikan terhadap PDRB. Untuk PMA sendiri, berdasarkan temuan dari Nurilmih, dkk (2023) menunjukkan bahwa PMA berkorelasi negatif dan tidak signifikan terhadap PDRB.

Lubis, dkk (2021) dalam penelitiannya juga menemukan bahwa angkatan kerja berkorelasi positif dan berpengaruh signifikan terhadap PDRB.

Saleh, dkk (2017) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa IPM berkorelasi positif dan berpengaruh signifikan terhadap PDRB. Hal ini sejalan dengan Sari (2022) berdasarkan temuannya dimana IPM juga berkorelasi positif dan berpengaruh signifikan terhadap PDRB.

Berdasarkan uraian diatas, dari ketiga faktor yang dipaparkan, yaitu investasi swasta (PMDN dan PMA), angkatan kerja, dan IPM perlu di uji dan dianalisis lebih dalam lagi apakah ketiga faktor tersebut benar-benar berpengaruh terhadap peningkatan perekonomian di Provinsi Sumatera Barat. Dengan demikian, dapat ditarik kesimpulan bahwa penelitian ini dilakukan dengan tujuan menganalisis fenomena dan permasalahan yang terjadi di Provinsi Sumatera Barat, sehingga penelitian ini berjudul **“Pengaruh Investasi Swasta, Angkatan Kerja, dan IPM Terhadap Perekonomian di Kabupaten/ Kota Provinsi Sumatera Barat”**.

1.2 Rumusan Masalah

Merujuk pada latar belakang yang di jelaskan, maka rumusan masalah pada penelitian ini yaitu bagaimana pengaruh dari Investasi swasta, angkatan kerja, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap perekonomian di Kabupaten/ Kota Provinsi Sumatera Barat periode 2015-2021?

1.3 Tujuan Penelitian

- 1) Menganalisis pengaruh dari investasi swasta (PMDN dan PMA) terhadap perekonomian di Kabupaten/ Kota Provinsi Sumatera Barat periode 2015-2021.
- 2) Menganalisis pengaruh dari angkatan kerja terhadap perekonomian di Kabupaten/ Kota Provinsi Sumatera Barat periode 2015-2021.
- 3) Menganalisis pengaruh dari IPM terhadap perekonomian di Kabupaten/ Kota Provinsi Sumatera Barat periode 2015-2021.

1.4 Manfaat Penelitian

- 1) Bagi peneliti, penelitian ini ditujukan sebagai pengaplikasian atau penerapan dari ilmu akademis perkuliahan dan sekaligus mengukur kemampuan yang dimiliki dalam menganalisa permasalahan yang dihadapi.
- 2) Bagi mahasiswa dan masyarakat, penelitian ini dapat bermanfaat untuk mahasiswa ataupun masyarakat dalam memperoleh informasi dan menambah wawasan ilmu pengetahuan khususnya dalam perencanaan pembangunan daerah.
- 3) Bagi pemerintah, penelitian ini dapat berguna sebagai acuan dalam membuat kebijakan mengenai pembangunan daerah untuk meningkatkan perekonomian di Kabupaten/ Kota Provinsi Sumatera Barat sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Agar menghindari terjadinya penyimpangan dan perluasan konsep, maka penelitian ini memanfaatkan informasi yang diperoleh dari 19 Kabupaten/ Kota Provinsi Sumatera Barat periode 2015-2021 yang meliputi data realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan data Penanaman Modal Asing (PMA), data angkatan kerja yang bekerja, data Indeks Pembangunan Manusia (IPM), serta data perekonomian yang diambil dari data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan (ADHK).

1.6 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bagian awal dari suatu penulisan yang menyajikan latar belakang, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian, dan sistematika penulisan penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Memaparkan landasan teori dari variabel yang akan diteliti, serta menguraikan tentang beberapa penelitian sebelumnya.

BAB III METODE PENELITIAN

Memperlihatkan proses suatu penelitian dimulai dari jenis penelitian, bentuk data yang digunakan, waktu dan tempat, metode apa yang digunakan dalam penelitian, variabel operasional, dan teknik analisis data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Menerangkan dan menjabarkan terkait deskripsi variabel serta menerangkan jawaban dari rumusan permasalahan, uji hipotesis, serta hasil penjabaran penelitian yang dilakukan.

BAB V PENUTUP

Bagian akhir dari penelitian yang memuat kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang diperoleh, yang nantinya saran tersebut diharapkan bisa bermanfaat bagi pembaca.

